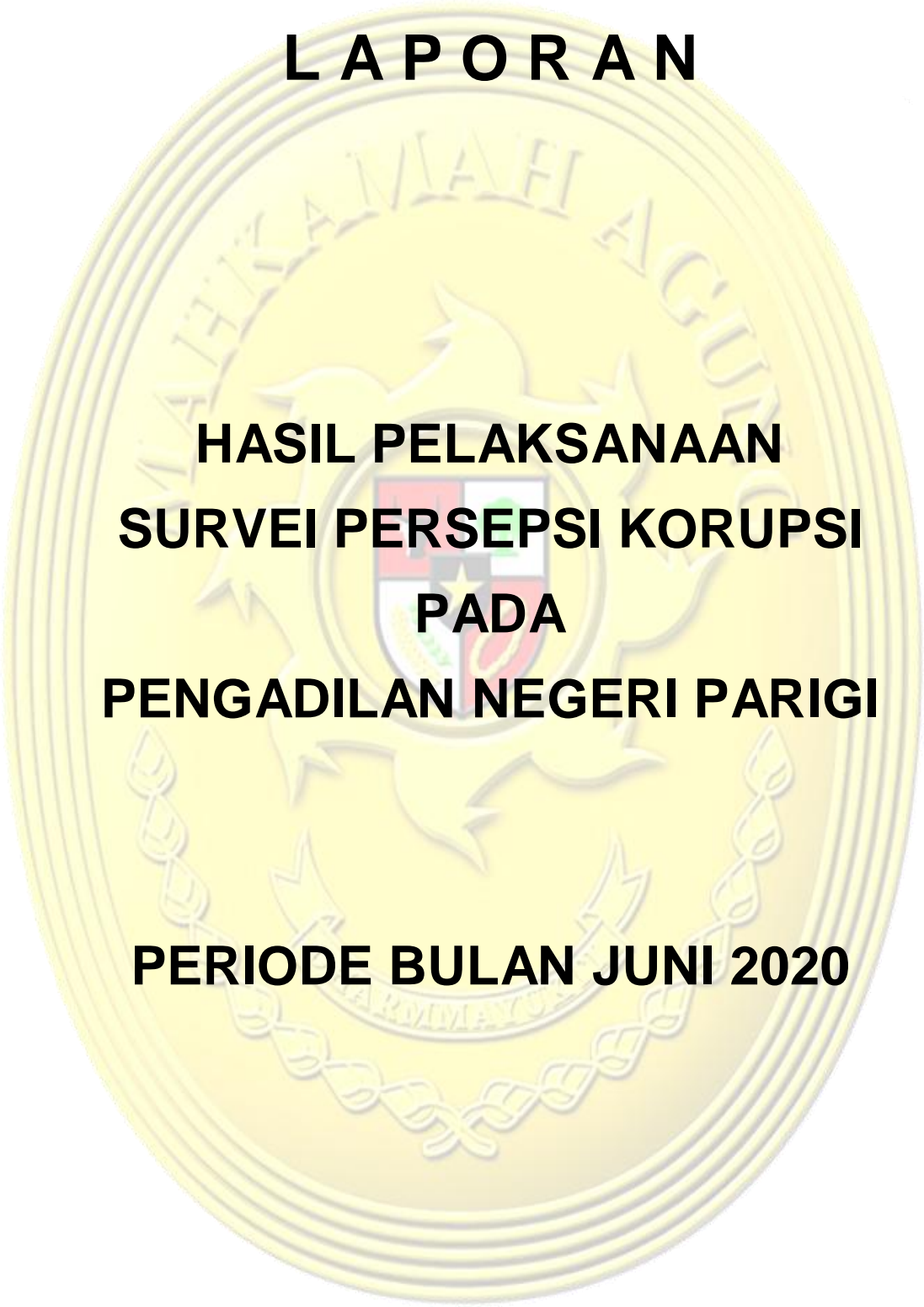


LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI PARIGI
PERIODE BULAN JUNI 2020**

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	5
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil responden	8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	10
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	15
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	15
BAB IV	17
PENUTUP	17
4.1. Kesimpulan	17
4.2. Rekomendasi.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data

minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan.

Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Dasar dan Menengah.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan	Jumlah (Org)	Keterangan
1	Tidak Sekolah	0	0,00 %
2	Sekolah Dasar	3	2,40 %
3	Sekolah Menengah Pertama	4	3,20 %
4	Sekolah Menengah Atas	66	52,80 %
5	Diploma (D1/D2/D3/D4)	11	8,80 %
6	Sarjana (S1)	33	26,40 %
7	Pasca Sarjana	8	6,40 %
Jumlah		125	100,00 %

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar **36,00 %** responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Parigi memiliki pekerjaan sebagai Petani.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan	Jumlah (Org)	Keterangan
1	PNS	12	7,33 %
2	TNI/POLRI	5	4,67 %
3	Karyawan Swasta	13	12,67 %
4	Wiraswasta	8	6,00 %
5	Petani	45	33,33 %
6	Nelayan	7	6,00 %
7	Pedagang	17	16,00 %
8	Pelajar/Mahasiswa	10	7,33 %
9	Lainnya	8	6,67 %
Jumlah		125	100,00 %

3.1.3. Jenis Kelamin responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa responden paling banyak adalah responden Perempuan, sebesar 54,40 %.

Tabel 6.
Jenis Kelamin responden

No	Pekerjaan	Jumlah (Org)	Keterangan
1	Laki-laki	57	45,60 %
2	Perempuan	68	54,40 %
Jumlah		125	100,00 %

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan (*Pertanyaan 1*)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **3,71**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja **Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Parigi Bersih Dari Korupsi**.

Tabel 7.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan (*Pertanyaan 1*)

No	Jawaban Responden	Jumlah (Org)	Indeks
A	Selalu Sesuai Prosedur	100	3,71
B	Sering Sesuai Prosedur	17	
C	Jarang Sesuai Prosedur	5	
D	Tidak Sesuai Prosedur	3	
Jumlah		125	

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan (*Pertanyaan 2*)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **3,87**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja **Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Parigi Bersih Dari Korupsi**.

Tabel 8.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan (*Pertanyaan 2*)

No	Jawaban Responden	Jumlah (Org)	Indeks
A	Tanpa Imbalan	111	3,87
B	Jarang Dengan Imbalan	12	
C	Sering Tanpa Imbalan	2	
D	Selalu Dengan Imbalan	0	
Jumlah		125	

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh *(Pertanyaan 3)*

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **3,88**
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Parigi **Bersih Dari Korupsi.**

Tabel 9.

Indeks pada indikator menjual pengaruh *(Pertanyaan 3)*

No	Jawaban Responden	Jumlah (Org)	Indeks
A	Tidak pernah dihubungi	116	3,88
B	Jarang dihubungi	5	
C	Sering dihubungi	2	
D	Selalu dihubungi	2	
Jumlah		125	

3.2.4. Indikator Transparansi Biaya *(Pertanyaan 4)*

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,85**
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Parigi **Bersih Dari Korupsi.**

Tabel 10.

Indeks pada indikator transparansi biaya *(Pertanyaan 4)*

No	Jawaban Responden	Jumlah (Org)	Indeks
A	Selalu Transparan	107	3,85
B	Sering Transparan	17	
C	Jarang Transparan	1	
D	Tidak Transparan	0	
Jumlah		125	

3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia (Pertanyaan 5)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **3,98**
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Parigi **Bersih Dari Korupsi**.

Tabel 11.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia (Pertanyaan 5)

No	Jawaban Responden	Jumlah (Org)	Indeks
A	Selalu sesuai tarif resmi	122	3,98
B	Sering sesuai Tarif resmi	3	
C	Jarang sesuai tarif resmi	0	
D	Tidak sesuai tarif resmi	0	
Jumlah		125	

3.2.6. Indikator Biaya Tambahan (Pertanyaan 6)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3,87**
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Parigi **Bersih Dari Korupsi**.

Tabel 12.

Indeks pada indikator tambahan biaya (Pertanyaan 6)

No	Jawaban Responden	Jumlah (Org)	Indeks
A	Tanpa ada biaya tambahan	113	3,87
B	Jarang ada biaya tambahan	9	
C	Sering ada biaya tambahan	2	
D	Selalu ada biaya tambahan	1	
Jumlah		125	

3.2.7. Indikator Hadiah (*Pertanyaan 7*)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **3,99**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Parigi **Bersih Dari Korupsi.**

Tabel 13.
Indeks pada indikator hadiah (*Pertanyaan 7*)

No	Jawaban Responden	Jumlah (Org)	Indeks
A	Selalu ada bukti transaksi	124	3,99
B	Sering ada bukti transaksi	1	
C	Jarang ada bukti transaksi	0	
D	Tidak ada bukti transaksi	0	
Jumlah		125	

3.2.8. Indikator Transparansi Pembayaran (*Pertanyaan 8*)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transpparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **3,74**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Parigi **Bersih Dari Korupsi.**

Tabel 14.
Indeks pada indikator transparansi pembayaran (*Pertanyaan 8*)

No	Jawaban Responden	Jumlah (Org)	Indeks
A	Tidak pernah tahu ada percaloan	104	3,74
B	Jarang tahu ada percaloan	13	
C	Sering tahu ada percaloan	5	
D	Selalu tahu ada percaloan	3	
Jumlah		125	

3.2.9. Indikator Percaloan (Pertanyaan 9)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3,51**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Parigi **Bersih Dari Korupsi**.

Tabel 15.

Indeks pada indikator percaloan (Pertanyaan 9)

No	Jawaban Responden	Jumlah (Org)	Indeks
A	Tidak pernah ada KKN	80	3,51
B	Jarang ada KKN	32	
C	Sering ada KKN	10	
D	Selalu ada KKN	3	
Jumlah		125	

3.2.10. Indikator Perbuatan Curang (Pertanyaan 10)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **3,61**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Parigi **Bersih Dari Korupsi**.

Tabel 16.

Indeks pada indikator perbuatan curang (Pertanyaan 10)

No	Jawaban Responden	Jumlah (Org)	Indeks
A	Tidak pernah mengurus perkara	88	3,61
B	Jarang ada mengurus perkara	26	
C	Sering mengurus perkara	10	
D	Selalu mengurus perkara	1	
Jumlah		125	

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Parigi.

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi **Satuan Kerja Pengadilan Negeri Parigi sebesar 3,80.**

Indeks **IPK** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **3,80**.

Tabel 17.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada **Pengadilan Negeri Parigi**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada **Pengadilan Negeri Parigi**.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja
pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Parigi
1	Fasilitas layanan ruang istirahat pengunjung harus ada;
2	Fasilitas layanan ruang kesehatan pengunjung harus ada
3	Fasilitas ATM harus ada
4	Fasilitas kantin harus ada
5	Aparat keamanan pengadilan harus ditambah jumlahnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja **Pengadilan Negeri Parigi** diperoleh informasi bahwa Indeks Persepsi Korupsi sebesar **3,80** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**

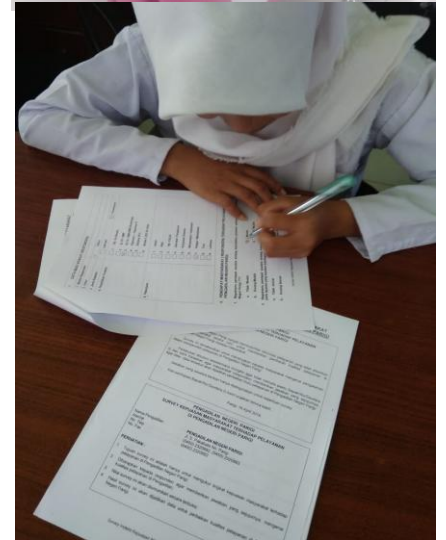
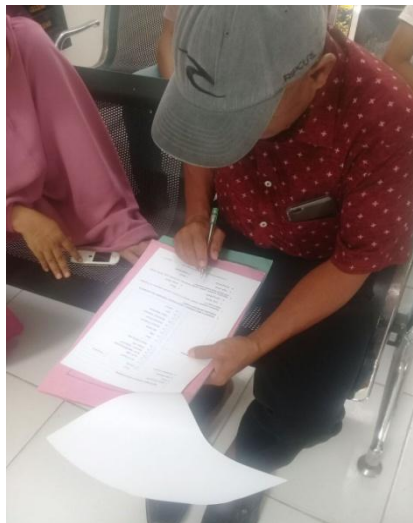
Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,71**.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,87**.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,88**.
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,85**.
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,98**.
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,87**.
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,99**.
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks **3,74**.
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,51**.
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,61**.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja **Pengadilan Negeri Parigi** periode **Bulan Oktober Tahun 2019** tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks IPK sebesar **3,80** atau masuk pada persepsi **Bersih Dari Korupsi**.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN SURVEY IPK BULAN JUNI 2020



REKAPITULASI JAWABAN KUESIONER INDEKS PRESEPSI KORUPSI (IPK) PN PARIGI BULAN JUNI 2020

	Rekap-1	Rekap-3	Rekap-4	Rekap-5	Rekap-6	Jumlah		%
Laki-laki	12	9	17	9	10	57	125	45,60
Perempuan	13	16	8	16	15	68		54,40
	25	25	25	25	25			
Tidak Sekolah	0	0	0	0	0	0	125	0,00
SD	1	0	1	0	1	3		2,40
SLTP	1	1	1	0	1	4		3,20
SLTA	15	12	11	15	13	66		52,80
DIPLOMA	2	4	3	1	1	11		8,80
Sarjana	4	6	6	8	9	33		26,40
Pasca Sarjana	2	2	3	1	0	8		6,40
	25	25	25	25	25			100,00
PNS	6	2	2	1	1	12	125	9,60
TNI/POLRI	1	0	1	2	1	5		4,00
Karyawan swasta	2	4	3	2	2	13		10,40
Wiraswasta	3	1	3	1	0	8		6,40
Petani	6	7	5	13	14	45		36,00
Nelayan	2	1	1	1	2	7		5,60
Pedagang	2	6	5	2	2	17		13,60
Pelajar/Mahasiswa	2	3	2	2	1	10		8,00
Lainnya	1	1	3	1	2	8		6,40
	25	25	25	25	25		100,00	

Jumlah responden

125

Jawaban Responden :

							NILAI		IPK	IPK x 25	IPK Tertimbang		
1	A	19	21	19	19	22	100	125	4	400	3,71	92,80	0,37
	B	5	4	3	4	1	17		3	51			
	C	1	0	2	1	1	5		2	10			
	D	0	0	1	1	1	3		1	3			
			25	25	25	25	25			464			
2	A	22	23	23	21	22	111	125	4	444	3,87	96,80	0,39
	B	3	2	2	3	2	12		3	36			
	C		0	0	1	1	2		2	4			
	D				0	0	0		1	0			
			25	25	25	25	25			484			
3	A	22	23	22	24	25	116	125	4	464	3,88	97,00	0,39
	B	2	1	1	1	0	5		3	15			
	C	1	0	1	0	0	2		2	4			
	D	0	1	1	0	0	2		1	2			
			25	25	25	25	25			485			
4	A	22	21	20	22	22	107	125	4	428	3,85	96,20	0,38
	B	3	4	4	3	3	17		3	51			
	C			1	0		1		2	2			
	D						0		1	0			
			25	25	25	25	25			481			

5	A	24	25	25	24	24	122	125	4	488	497	3,98	99,40	0,40
	B	1	0	0	1	1	3		3	9				
	C						0		2	0				
	D						0		1	0				
		25	25	25	25	25								
6	A	22	23	22	25	21	113	125	4	452	484	3,87	96,80	0,39
	B	2	2	2	0	3	9		3	27				
	C	1		0	0	1	2		2	4				
	D	0	0	1	0	0	1		1	1				
		25	25	25	25	25								
7	A	25	25	24	25	25	124	125	4	496	499	3,99	99,80	0,40
	B	0	0	1	0	0	1		3	3				
	C						0		2	0				
	D						0		1	0				
		25	25	25	25	25								
8	A	19	21	22	23	19	104	125	4	416	468	3,74	93,60	0,37
	B	4	3	2	1	3	13		3	39				
	C	2	0		1	2	5		2	10				
	D	0	1	1	0	1	3		1	3				
		25	25	25	25	25								

9	A	15	15	17	17	16	80	125	4	320				
	B	7	7	7	6	5	32		3	96				
	C	2	3	1	1	3	10		2	20				
	D	1	0	0	1	1	3		1	3				
		25	25	25	25	25				439				
10	A	20	20	16	17	15	88	125	4	352				
	B	4	3	7	5	7	26		3	78				
	C	1	2	2	3	2	10		2	20				
	D		0			1	1		1	1				
		25	25	25	25	25				451				
IPK Total										38,02	950,40	3,80		
Rata-rata Nilai = Total Nilai / Jumlah Unsur Penilaian										3,80	95,04	0,38		

**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
BULAN JUNI TAHUN 2020**

IDENTITAS RESPONDEN:

1. Nama :
2. Instansi/Perusahaan :
3. Umur (Tahun) :
4. JenisKelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
5. Pendidikan terakhir : 1. Tidak sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
2. SD 6. Sarjana (S1)
3. SMP/SLTP 7. PascaSarjana (S2/S3)
4. SLTA
5. Pekerjaan Utama : 1. PNS 5. Petani/Nelayan
2. TNI/Polri 6. Pedagang
3. PegawaiSwasta 7. Pelajar / Mahasiswa
4. Wiraswasta 8. Lainnya.....

PETUNJUK :

1. Mohon diisid sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi tema maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei	
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)	JAWABAN
1. Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	a. Selalu sesuai prosedur b. Sering sesuai prosedur c. Jarang sesuai prosedur d. Tidak sesuai prosedur
2. Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu di berikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	a. Petugas melayani tanpa meminta imbalan b. Petugas melayani jarang meminta imbalan c. Petugas melayani sering meminta imbalan d. Petugas melayani selalu meminta imbalan
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?	a. Tidak pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
5. Apakah selalu membayar sesuai tariff resmi tanpa ada biaya tambahan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan pengadilan?	a. TidakPernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
9. Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN pengadilan?	a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan?	a. TidakPernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu

PETUGAS PELAKSANA :

1. Petugas:

- Nama : ..
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

2. Pencacah/Penghitung hasil survei:

- Nama :
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

3. Pengawas/Pemeriksa:

- Nama :
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :